

# **KONTRIBUSI *CRITICAL THEORY* DALAM PERKEMBANGAN STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL DI INDONESIA**

**Sonny Sudiar**

Universitas Mulawarman

Email: [sonny.azzam.sudiar@gmail.com](mailto:sonny.azzam.sudiar@gmail.com)

**Yuniarti**

Universitas Mulawarman

Email: [yuniarti2306@yahoo.com](mailto:yuniarti2306@yahoo.com)

## **Abstract**

This article examines the main theoretical contribution of critical theory in analyzing the contemporary of international relations phenomena. Empirical and conceptual applications of critical theory as a perspective in international relations study are discussed. It is argued that critical theory has specific contribution to the development of international relations studies in Indonesia.

**Keywords:** Critical Theory, Studi HI, Indonesia

## **Pendahuluan**

Secara progresif studi Hubungan Internasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat selama abad ke-20 bersamaan dengan munculnya berbagai pendekatan yang digunakan untuk menganalisis berbagai

fenomena dan peristiwa yang terjadi dalam sistem internasional. Teori-teori yang dikembangkan sejak awal kemunculan studi Hubungan Internasional hingga saat ini sebenarnya merupakan sebuah upaya untuk mengkonstruksi sebuah disiplin ilmu Hubungan Internasional yang mampu menjelaskan fenomena-fenomena yang berkembang dalam kaitannya dengan politik luar negeri, hukum internasional, organisasi internasional, studi kawasan, kajian strategis, pembangunan internasional, komunikasi internasional, studi perdamaian dan penyelesaian konflik (Coulumbis & Wolfe, 1999).

Perkembangan studi Hubungan Internasional kontemporer tersebut juga ditengarai sebagai akibat dari perubahan dramatis yang terjadi dalam praktik hubungan internasional. Perubahan yang ditandai dengan munculnya isu-isu baru, seperti: kerusakan lingkungan, *global warming*, *food security*, *human security*, kesetaraan gender, kemiskinan, dll. Perubahan tersebut semakin kompleks dengan hadirnya sejumlah aktor-aktor baru dalam hubungan internasional (seperti: MNCs, NGOs, kelompok etnik, *global social movement*) yang kian hari perannya semakin signifikan dalam kancah interaksi ekonomi-politik global.

Transformasi isu dan aktor dalam studi Hubungan Internasional tersebut perlu dikaji dengan serius, adakah ini terjadi begitu saja? Atau memang ada faktor lain yang mengharuskannya berubah? Untuk menjawab problem kompleksitas fenomena hubungan internasional tersebut tentu memunculkan tugas besar menyangkut bagaimana para penstudi Hubungan Internasional menyediakan instrumen analisis yang memadai yang dapat menjelaskan setiap jengkal realitas politik global. Pada saat yang bersamaan juga muncul kesadaran bahwa fenomena ini barangkali memang tidak mungkin tidak cukup bisa dijelaskan oleh teori-teori besar (*grand theories*). Beberapa penstudi di dalam komunitas Hubungan Internasional melihatnya secara skeptis: adalah terlalu ambisius jika disiplin Hubungan Internasional dianggap mampu

menyediakan kerangka besar untuk menjelaskan fenomena yang kompleks dan rumit tersebut secara komprehensif (Yulius P. Herawan, 2007: ix)

Harus diakui memang bahwa perspektif-perspektif mainstream yang bercorak positivisme masih sangat kental mendominasi carapandang dan instrumen analisis dalam studi hubungan internasional. Perspektif-perspektif tersebut tidak hanya digunakan oleh para analis HI dalam mengkaji fenomena dan peristiwa internasional yang terjadi dalam arena transaksi politik global. Bahkan lebih jauh perspektif-perspektif mainstream juga sering dijadikan basis oleh para pengambil kebijakan (*decision maker*) di banyak negara dalam merumuskan langkah-langkah dan strategi kebijakan luar negeri mereka.

Sejak kemunculannya sebagai disiplin ilmu pengetahuan, Hubungan Internasional telah diwarnai dengan sejumlah perdebatan besar (*great debates*) mengenai pendekatan yang digunakan dalam mengkaji peristiwa hubungan internasional. Perdebatan yang membentuk teori dalam Hubungan Internasional menjadi semakin menarik untuk dieksplorasi. Dalam dinamikanya studi Hubungan Internasional tidak bisa lepas dari perkembangan teori-teorinya yang saling beradu dalam perdebatan-perdebatan besar I – IV (*great debates*) untuk menunjukkan kesahihannya dalam menjelaskan hubungan internasional. Meskipun dalam hubungan internasional terdapat beragam teori dengan fokus dan nilainya masing-masing, ada empat tradisi teoritis penting dalam hubungan internasional yaitu Realisme, Liberalisme, Pendekatan Masyarakat Internasional, teori-teori Ekonomi Politik Internasional, seperti: Merkantilisme, Liberalisme Ekonomi, dan Marxisme atau Strukturalisme (Jackson dan Sorensen, 2009: 44).

Teori-teori ini dikelompokkan ke dalam teori-teori tradisional. Selain itu, ada pula teori yang termasuk dalam kelompok positivisme yaitu Neorealisme dan Neoliberalisme, dan teori-teori alternatif yang termasuk dalam

pospositivisme, yaitu Teori Kritis, Posmodernisme, Konstruktivisme, dan Teori Normatif.

Ada empat perdebatan besar yang mewarnai perkembangan studi ini. Perdebatan pertama adalah antara liberalisme utopia dengan realisme tentang perbedaan nilai yang dianut. Liberalisme utopia berpegang pada keyakinan terhadap perdamaian dan kerjasama internasional, sedangkan realisme berpegang pada politik kekuasaan dan peperangan. Perdebatan kedua berhubungan dengan masalah metodologi antara pendekatan tradisional yang berdasar pada filosofi, nilai/norma, sejarah, hukum, praktik diplomasi dengan pendekatan behavioralis yang berdasar pada hipotesis, pengumpulan data dan pengetahuan ilmiah. Perdebatan ketiga muncul ketika isu politik keamanan, dan, perang dan damai bergeser ke arah ekonomi politik seiring dengan munculnya masalah keterbelakangan ekonomi di Dunia Ketiga. Perdebatan ini terjadi antara kelompok realisme/neorealisme dan liberalisme/neoliberalisme dengan neomarxisme (yang fokus pada masalah sistem dunia kapitalis, ketergantungan dan keterbelakangan). Perdebatan keempat terjadi antara pendekatan-pendekatan yang mapan (empat tradisi teori hubungan internasional) dengan pendekatan-pendekatan alternatif atau pospositivis.

Perdebatan keempat menjadi perkembangan studi yang penting saat ini. Meskipun dalam perdebatan ini tidak ada kelompok teori yang bisa mengklaim sebagai pemenang, setidaknya perdebatan ini memberikan dinamika konstruktif dalam Studi HI. Perdebatan ini muncul karena perubahan agenda dalam hubungan internasional seiring dengan berakhirnya Perang Dingin. Isu-isu baru yang bermunculan— seperti disintegrasi dan perpecahan negara, perang saudara, demokratisasi, minoritas internasional, intervensi kemanusiaan, pembersihan etnis, masalah pengungsi dan migrasi, keamanan lingkungan, gender, dan sebagainya— tidak mampu dijelaskan oleh teori-teori tradisional yang telah mapan dalam

hubungan internasional. Isu-isu baru inilah yang menjadi perhatian teori-teori alternatif sehingga kelompok teori ini cepat mendapatkan simpati dari penstudi hubungan internasional. Singkatnya, ada perdebatan baru dalam hubungan internasional yang berkaitan dengan isu-isu metodologis, yakni bagaimana mendekati Studi HI dan isu-isu penting, yaitu isu-isu yang seharusnya dipandang paling penting dalam hubungan internasional untuk dipelajari (Jackson dan Sorensen, 2009: 79).

### **Teori Kritis Internasional: Sebuah Kajian Teoritik**

Dalam hubungan internasional, Teori Kritis berkaitan erat dengan Ekonomi Politik Marxis. Teoritisi Kritis HI yang terkenal adalah Robert Cox (1981; 1996) dan Andrew Linklater (1990; 1996). Teoritisi Kritis menolak tiga postulat dasar positivisme, yaitu: realitas eksternal objektif, perbedaan subyek dan obyek, dan ilmu sosial bebas nilai. Menurut Teoritisi Kritis, tidak ada politik dunia atau ekonomi global yang berjalan sesuai dengan hukum sosial yang kekal. Segala sesuatu yang sosial, termasuk hubungan internasional adalah historis. Dunia sosial merupakan konstruksi waktu dan tempat dimana sistem internasional merupakan konstruksi khusus dari negara-negara yang paling kuat. Sejak politik dunia dikonstruksikan dan bukan ditemukan, maka tidak ada perbedaan mendasar antara subyek (analisis) dan obyek (fokus analisis).

Bagi teoritis kritis, pengetahuan bukan dan tidak dapat netral baik secara moral maupun secara politik atau ideologi. Semua pengetahuan mencerminkan kepentingan dari para pengamat. Pengetahuan bersifat bias karena dihasilkan dari perspektif sosial dari analisis. Pengetahuan membuka suatu kecenderungan—sadar atau tidak sadar—menuju kepentingan, nilai-nilai, kelompok-kelompok, golongan-golongan, kelas-kelas, bangsa-bangsa tertentu dan seterusnya. Semua Teori HI juga bias. Robert Cox (1981)

menyatakan bahwa teori selalu bagi seseorang dan untuk tujuan tertentu (*theory is always for someone and some purposes*).

Semua teori mempunyai perspektif. Perspektif tergantung posisi ruang dan waktu, khususnya dalam konteks sosial dan politik. Dunia dilihat dari perspektif yang bisa didefinisikan dalam konteks bangsa atau kelas sosial, dominasi dan subordinasi, peningkatan dan penurunan kekuasaan, pengalaman lampau, dan harapan dan pengharapan masa depan. Tentu saja, teori yang baik bukanlah teori yang mengekspresikan sebuah perspektif saja. Semakin baik teori semakin merefleksikan dirinya dan melebihi perspektifnya sendiri, tetapi perspektif awal selalu ada dalam teori dan relevan untuk eksplorasi. Oleh karena itu, tidak ada teori yang terpisah dari konteks ruang dan waktu. Ketika sebuah teori merepresentasikan dirinya, penting untuk mengujinya sebagai ideologinya dan mengungkapkan perspektif terselubungnya (Robert Cox dalam Richard Little & Smith, 2006).

Robert Cox menggambarkan suatu perbedaan antara pengetahuan penyelesaian masalah (*problem solving approach*) dengan pengetahuan emansipatori (*emansipatory approach*). Postivist atau pendekatan pengetahuan penyelesaian masalah bersifat bias karena menuju status quo internasional yang berdasarkan pada perbedaan kekuatan dan meniadakan banyak orang. Pengetahuan penyelesaian masalah pada dasarnya konservatif: pendekatan ini berupaya untuk mengetahui apa yang ada/terjadi pada saat ini. Namun tidak dapat menunjukkan pada pengetahuan tentang kemajuan manusia dan emansipasi yang merupakan pengetahuan yang hendak disediakan oleh teori Kritis.

Dalam HI, Teori Kritis tidak terbatas pada suatu pengujian negara dan sistem negara tetapi memfokuskan lebih luas pada kekuatan dan sominiasi di dunia secara umum. Teoritis Kritis mencari pengetahuan bagi tujuan politis yaitu untuk membabaskan kemanusiaan dari struktur politik dan ekonomi

dunia yang menekan yang dikendalikan oleh kekuatan hegemon, khususnya negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat. Teoritisi ini berupaya mendobrak dominasi global negara-negara kaya di belahan bumi utara atas negara-negara miskin di belahan bumi selatan. Dalam hal ini, Teori Kritis tidak bisa dibedakan dengan EPI Marxis. Orientasi mereka menuju perubahan progresif dan keinginan untuk menggunakan teori untuk membawa perubahan juga merupakan pengenalan idealisme (Jackson dan Sorensen, 2009: 300).

Teoritisi Kritis secara terbuka bersifat politis karena menganjurkan dan memajukan ideologi progresifnya (biasanya sosialis) atas emansipasi yang yakin bahwa ilmuwan konservatif dan ilmuwan liberal mempertahankan dan memajukan nilai-nilai politisnya. Teoritisi Kritis dengan demikian yakin bahwa perdebatan teoritis ini pada dasarnya perdebatan politik. Seperti kaum idealis, teoritis kritis sedang mencoba menciptakan revolusi sosial dan politik yang dinyatakan ideologinya. Perbedaannya adalah teoritis kritis menolak kemungkinan pengaitan akademik dan obyektivitas, sementara kaum idealis tidak menyadarinya (Jackson & Sorensen, 2009: 300-301).

Pandangan mereka atas pengetahuan yang inheren politis memisahkan teoritis kritis dari kaum behavioral dengan teoritis positif yang meremehkan penggunaan pengetahuan ilmiah untuk tujuan-tujuan politis, dan teoritis klasik atau tradisional. Menurut Teori Kritis, ilmuwan HI tidak dapat dipisahkan dari permasalahan pokok yang mereka pelajari karena mereka terlibat di dalamnya atau mereka adalah bagian dari apayang mereka pelajari. Baik disadari atau tidak, ilmuwan sosial dan ilmu sosial merupakan instrumen-instrumen kekuatan. Teori Kritis berupaya mengetahui kepentingan politis yang terdapat dalam teori-teori HI yang berbeda. Selain itu, Teori Kritis berupaya untuk menggali tujuan akhir dari pengetahuan yaitu emansipasi manusia dari struktur global yang mengistimewakan

kelompok minoritas penduduk dunia yang relatif kecil atas penderitaan mayoritas penduduk dunia. Teori Kritis dengan demikian dapat dipahami secara eksplisit dan diakui revolusioner. Teori Kritis berupaya merobohkan sistem ekonomi politik dunia yang ada.

Masalah utama dengan pandangan ini adalah masalah yang berkaitan dengan pengambilan sikap terhadap kebebasan akademik dan integritas riset ilmiah dan keilmuan. Teori Kritis menyatakan secara ekstrim bahwa pengetahuan bersifat politis, atau tidak ada pengetahuan yang benar-benar bebas nilai. Meskipun ada kebingungan jika Teori Kritis bersifat politis dan tidak bebas nilai maka Teori Kritis adalah politik, Robert Cox berupaya keras untuk membuktikan bahwa ada perbedaan antara politik murni dengan upaya memberikan penjelasan dan pemahaman dalam hubungan internasional akademik. Meskipun demikian, kegiatan akademik inipun tidak benar-benar terpisah dari politik tetapi dengan analisis yang sistematis dan tidak memihak (Jackson dan Sorensen, 2009: 302).

Muhadi Sugiono dalam tulisannya yang berjudul Teori Kritis dalam Hubungan Internasional (2009: 159) menjelaskan bahwa berkembangnya Teori Kritis jelas telah mengubah secara signifikan Disiplin HI dan obyek studinya, yaitu politik global. Sementara mahasiswa HI pada tahun-tahun sebelum tahun 1990-an selalu diajarkan untuk melihat hubungan internasional sebagai hubungan politik antar negara dan dituntut untuk mempelajarinya dengan standar keilmuan alam, yaitu hanya memperhatikan fakta dan kepastian, sementara Teori Kritis tidak sekedar menghadirkan isu-isu baru dalam hubungan internasional tetapi juga membuka ruang untuk mempelajari hubungan internasional tanpa mengabaikan nilai, moral, opini atau aspirasi. Meskipun demikian, kemunculan Teori Kritis dalam Hubungan Internasional menimbulkan kontroversi.



Dalam tulisannya tersebut, Sugiono menjelaskan perkembangan awal perkembangan Teori Kritis sebagai salah satu pendekatan reflektifis dalam kategori Robert Keohane. Dijelaskan bagaimana terdapat perbedaan *stand point* di antara pemikir-pemikir Teori Kritis dari Robert Keohane dan John Mearsheimer yang berpegang pada sifat refleksionis pada Teori Kritis, Ted Hopf dengan sifat konstruktivis pada Teori Kritis, Jurgen Habermas pada masalah anti rasionalitas, hingga Gramsci pada masalah ekonomi politik.

Berikutnya yang menjadi fokus dalam tulisan Sugiono ini adalah kontribusi Teori Kritis dalam Perkembangan Hubungan Internasional. Menurutnya, perkembangan teoritis dalam Disiplin Ilmu HI seringkali digambarkan melalui Perdebatan Besar yang saat ini memasuki tahap ketiga. Dilihat dengan begitu tidak dapat dipungkiri, bahwa Teori Kritis memberikan kontribusi yang signifikan dalam disiplin HI. Kontribusi ini tidak hanya dilihat dari bertambahnya 'menu teoritis' dalam HI tetapi juga maraknya reaksi negatif yang menentang teori ini melalui berbagai aspek. Tetapi, reaksi, oposisi dan kritik terhadap teori ini menyebabkan munculnya Perdebatan Ketiga dan menjadikan disiplin Ilmu HI lebih dinamis. Berkembangnya Teori Kritis telah mendobrak dominasi tiga wacana besar dalam Studi HI yaitu: Metodologi Positivistis, Realisme, dan Marxisme atau Neo Marxisme. Pada saat yang bersamaan, Teori Kritis juga membuka ruang bagi pemikiran-pemikiran normatif dalam Studi HI dan mendorong minat Ilmuwan HI untuk memberikan perhatian pada teori-teori politik dan sejarah pemikiran internasional.

Bersamaan dengan kontribusinya bagi perkembangan Studi HI, Teori Kritis juga mendapatkan kritik keras dari kelompok Positivistis dengan dua argumen dasar. Secara metodologis, para pendukung positivistis mempertanyakan hakikat Teori Kritis. Sebagai sebuah sub-disiplin dari sebuah disiplin yang menyandang atribut ilmu, yakni Ilmu Politik, IlmuHI

juga harus mencerminkan karakter dan metode keilmuan pada umumnya. Karakter dan metode ini tentu saja harus mengacu pada karakter dan metode yang digunakan oleh ilmu-ilmu alam. Dengan kata lain, dalam pandangan para pendukung positivis, landasan keilmuan Teori Kritis sangat menyesatkan.

Selain itu, Teori Kritis juga menjadi sasaran kritik karena terlalu menekankan pada relativitas dan subyektifitas, yang secara sederhana berarti apapun bisa diterima karena pada akhirnya interpretasi, dan bukan fakta, yang menentukan realitas dunia sosial. Kecenderungan ke arah relativisme ini menjadikan Teori Kritis tidak mampu menawarkan teori yang universal yang memiliki kemampuan eksplanasi ataupun menjadi panduan bagi para pembuat kebijakan.

### **Orientasi Teoritis Studi Hubungan Internasional di Indonesia**

Perkembangan studi HI di Indonesia sangat dipengaruhi oleh orientasi kebijakan luar negeri pemerintah. Hal ini disebabkan karena awal kelahirannya adalah untuk mencetak para diplomat yang ditempatkan di perwakilan-perwakilan Indonesia di luar negeri. Oleh karena itu, orientasi teoritis studi HI Indonesia lebih pada teori-teori tradisional HI yang lahir di Amerika Serikat, seperti realisme dan liberalisme, yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam HI.

Beberapa akademisi yang berspesialisasi dalam studi HI, seperti di Universitas Gadjah Mada - Yogyakarta dan Universitas Airlangga – Surabaya, berpendapat yang sama bahwa orientasi teoritis studi HI di Indonesia berjalan mengikuti tujuan awal terbentuknya jurusan HI, yaitu *state centris* dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga ahli untuk berdiplomasi dan negosiasi di dunia internasional. Kerangka berpikir *state centrism* ini terjawab dengan teori-teori tradisional seperti realisme dan liberalisme yang menekankan negara sebagai aktor utama dan memiliki peran-peran strategis. Teori-teori

ini tumbuh dan berkembang di Amerika dan kemudian meluas sampai ke kawasan—kawasan dan negara—negara lain, termasuk Indonesia. Cukup lama studi HI di Indonesia sejak kemunculannya di tahun 1950-an didominasi oleh pendekatan tradisional sampai dengan tahun 2000-an baru muncul pendekatan-pendekatan alternatif.

Senada dengan hal tersebut, Menurut Susanto (2012), studi HI Indonesia didominasi oleh persoalan-persoalan politik, studi HI Indonesia dan studi HI pada umumnya berkembang dalam kecenderungan yang lebih berkuat pada persoalan bangsa. Kalaupun akhirnya menyentuh isu-isu diluar persoalan politik ataupun negara bangsa, studi HI Indonesia dan studi HI secara umum dalam praktiknya cenderung mendekatinya dalam sudut pandang yang *'state-centred'* atau *'politics-centred'*.

Pada masa Sukarno dan Suharto, peran negara mendominasi segala aspek kehidupan. Sebagai negara yang pernah dijajah, kedua pemimpin negara ini, disibukkan dengan ide ketahanan nasional (*self-resilience*) dan proses *nation building* sehingga peran negara yang dominan dianggap efektif dalam menyelesaikan permasalahan bangsa di awal kemerdekaan dan awal proses pembangunannya. Kedekatan dengan Barat, terutama Amerika Serikat, pada masa pemerintahan Suharto tidak memberikan pilihan lain selain penempatan negara sebagai aktor utama dalam dan luar negeri. Demokrasi yang dijalankan dengan asas Pancasila sebagai dasar negara pun berjalan sesuai dengan persepsi pemimpin tersebut. Akibatnya, realisme menjadi pendekatan populer untuk menjelaskan fenomena ini.

Sebenarnya, Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang bisa menciptakan teori HI yang tidak mengacu pada teori-teori Barat, baik yang positivisme maupun yang post-positivisme. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki persepsi atau carapandang yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang dianutnya sebagai bangsa dan negara sehingga kekhasan ini bisa

muncul sebagai penawaran yang berbeda dari teori-teori yang sudah ada dalam HI sebelumnya.

Menurut Sebastian dan Lanti (Acharya dan Buzan, 2010), Indonesia bisa menciptakan teori-teori HI non-Barat karena memiliki sumber-sumber pembentukan yang khas, yaitu: budaya politik Jawa (yang dianut oleh Sukarno dan Suharto), budaya politik seberang (yang bersumber dari budaya etnis-etnis lain di Indonesia selain budaya Jawa), pengaruh Islam (karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas Islam terbesar di dunia), dan perilaku politik pemimpin-pemimpin negara ini.

Dengan sumber-sumber yang cukup memadai ternyata belum mampu dimanfaatkan bagi para ahli studi HI di Indonesia untuk membentuk teori Hubungan Internasional non-Barat. Teori-teori yang diajarkan dan berkembang di Indonesia masih diwarnai oleh *state centric* atau *American-centric*. Meskipun muncul pemikiran-pemikiran baru tentang yang berlabel postpositivisme, pemikiran-pemikiran ini tidak juga mengubah konstelasi teori-teori HI di Indonesia.

### **Posisi Teori Kritis dalam Studi Hubungan Internasional di Indonesia**

Teori Kritis muncul sebagai salah satu pemikiran alternatif dalam studi HI sekitar awal tahun 1980an. Teori ini telah membentuk bagian inti pemikiran yang lebih luar, yang dikenal sebagai wilayah pospositivisme, yang berupaya untuk menantang asumsi metateoritis dari pemikiran HI tradisional dan berusaha mengartikulasikan dan mengoperasionalkan prinsip-prinsip dan persepsi-persepsi yang berbeda (Jones, 2001).

Kemunculan Teori Kritis di Indonesia sendiri baru terlihat pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an ketika materi reflektif yang salah satunya adalah teori kritis dimasukkan dalam bahasan teori-teori HI atau teori-teori politik internasional di universitas-universitas di Indonesia. Namun,

masih dominannya pendekatan tradisional yang berpusat pada negara menyebabkan Teori Kritis dikenal sebatas referensi teori.

Sejak kemunculannya di Indonesia, Teori Kritis tidak memiliki posisi yang menguntungkan jika dibanding dengan teori-teori tradisional karena kebutuhan negara dan permasalahan yang dihadapinya lebih berorientasi pada pendekatan negara. Bahkan dalam perkembangannya, studi HI masih sangat sedikit yang berorientasi pada pendekatan-pendekatan alternatif termasuk Teori Kritis. Masih sedikit universitas yang mulai mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis dan beralih pada pendekatan *non-state*. Padahal di Indonesia pendekatan-pendekatan tradisional ini tidak selalu bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh bangsa.

### **Kontribusi Teori Kritis terhadap Perkembangan Studi Hubungan Internasional di Indonesia**

Dari perbedaan pandangan-pandangan tentang posisi Teori Kritis dalam perkembangan studi HI di Indonesia—baik yang mendukung dan melihat pentingnya kontribusi teori ini, atau meragukannya dengan berasumsi bahwa teori ini tidak banyak dan bahkan tidak memberi solusi, sekedar menentang keamanan teori-teori tradisional atau klasik, dan sebagainya— dapat dilihat bagaimana teori ini mempengaruhi perkembangan studi HI secara umum. Kontribusi teori ini bisa dilihat dalam tiga hal yaitu: perspektif atau teori, epistemologi dan metodologi, dan praktis atau penerapannya dalam HI.

Kemunculan Teori Kritis di Indonesia sekitar tahun 1990-an kurang begitu populer. Hal ini antara lain karena studi HI di Indonesia masih kental dengan nuansa teori-teori klasik yang anggap paling relevan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam studi HI, dan tepat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan negara dalam praktek hubungan antara negara baik di kawasan maupun global.

Meskipun demikian, pendekatan-pendekatan alternatif seperti Teori Kritis mampu memperkaya keberagaman teori-teori yang ada dalam studi HI dan menghidupkan debat dalam HI sehingga muncul *Great Debate IV* dalam HI. Dalam perdebatan ini, teori-teori yang mapan termasuk di dalamnya teori-teori klasik (realisme dan liberalisme), tradisi behavioralis (neorealisme dan neoliberalis), pendekatan masyarakat internasional dan teori-teori ekonomi politik internasional menghadapi beragam kritik dari teori-teori alternatif yang dikenal dengan istilah *pospositivis*. Teori Kritis merupakan teori pertama yang termasuk dalam kelompok *pospositivist* yang menentang teori-teori yang mapan tersebut.

Dua faktor membantu menjelaskan perkembangan tersebut. Pertama, berakhirnya Perang Dingin mengubah agenda internasional dalam hal-hal mendasar. Sebagai ganti dari Konflik Timur—Barat yang dikuasai oleh dua *superpower* yang bermusuhan, sejumlah isu yang beragam bermunculan dalam politik dunia, termasuk sebagai contoh: disintegrasi dan perpecahan negara, perang saudara, demokratisasi, minoritas nasional, intervensi kemanusiaan, pembersihan etnis, masalah pengungsi dan migrasi besar-besaran, keamanan lingkungan dan seterusnya. Kedua, semakin meningkatnya jumlah penstudi HI yang menunjukkan ketidakpuasan dengan pendekatan Perang Dingin yang dominan dalam HI yaitu neorealisme Kenneth Waltz. Banyak penstudi HI sekarang mengambil isu yang dinyatakan Waltz bahwa dunia HI yang kompleks dapat ditekan dalam sejumlah pernyataan serupa hukum (*law-like*) tentang struktur sistem internasional dan perimbangan kekuatan. Dengan demikian mereka memperkuat kritik kaum anti behavioralis yang pertama kali ditempatkan teoritisasi Masyarakat Internasional seperti Headley Bull (1969). Banyak penstudi HI juga mengkritik neorealisme Waltz atas pandangan politiknya yang konservatif: tidak ada begitu banyak dalam neorealisme yang dapat

menunjukkan perubahan penciptaan dunia yang lebih baik (Jackson and Sorensen, 1999).

Kemunculan pospositivis dalam studi HI inilah yang memungkinkan masalah-masalah HI dilihat dari sudut pandang manapun dengan cara apapun tidak terikat pada pandangan negara, masalah perang dan damai, politik kekuasaan, kekuatan militer, kekayaan dan kemiskinan, dan kerjasama dan konflik. Aktor dan isu dalam HI menjadi sama penting dan relevan tergantung ruang dan waktu dimana ia ditempatkan. Akhirnya baik teori-teori klasik maupun pendekatan alternatif menjadi sama penting untuk menganalisis fenomena-fenomena dalam HI karena beragamnya isu dalam politik dunia pasti membutuhkan pendekatan yang beragam pula.

Tahun 1980an, studi HI mengalami perdebatan epistemologi dan ontologi yang memunculkan perdebatan antara metodologi positivisme dan pos positivisme. Metode positivisme berpegang pada asumsi bahwa pengetahuan termasuk HI harus bebas nilai dan obyektif. Hal inilah yang ditentang oleh kelompok pos positivisme dengan berasumsi bahwa pengetahuan tidak bebas nilai dan tidak obyektif. Teori kritis termasuk dalam kelompok *post positivist* yang menekankan pada cara berpikir bahwa pengetahuan sarat akan nilai-nilai sosial dan politik yang ada di sekelilingnya. Inilah yang menurut Robert Cox (1981) dengan asumsi "*Theory is always for someone and some purposes*".

Pernyataan Cox diatas menggambarkan bahwa sebenarnya semua teori dibuat dengan tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan dari awal. Sehingga ini juga memperlihatkan bahwa ada nilai-nilai tertentu yang termasuk dalam proses pembuatan pengetahuan. Inilah yang disebut oleh kelompok pospositivisme sebagai subyektif, dan tidak mungkin ada pengetahuan yang bebas nilai termasuk studi HI yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu sosial. Dalam memahami dan menganalisis fenomena-fenomena HI, ilmuan HI menjadi bagian dari apa yang ditelitinya.

Masalah epistemologi yang berhubungan dengan justifikasi dan verifikasi klaim-klaim pengetahuan, metodologi yang diaplikasikan dan lingkup dan tujuan penelitian, dan masalah ontologi yang berhubungan dengan sifat aktor sosial dan formasi historis lainnya dan struktur dalam hubungan internasional, semuanya membawa implikasi normatif yang dibicarakan secara tidak seimbang. Dalam hal ini, salah satu kontribusi Teori Kritis adalah memperluas domain HI tidak hanya memasukkan asumsi epistemologi dan ontologi, tetapi juga memperlihatkan hubungan teori HI dengan komitmen politik.

Ada dua hal penting sehubungan dengan hubungan teori HI dengan pengaruh politik. Pertama, pertimbangan masalah epistemologi dengan menjelaskan bagaimana perbedaan antara konsepsi teori tradisional dan kritis yang dibuat Max Horkheimer muncul dalam HI. Kedua, elaborasi hubungan antara Teori Kritis dan teori emansipasi. Dua hal ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran kepentingan politik dalam proses pembentukan pengetahuan. Seperti yang dijelaskan oleh Cox bahwa teori selalu untuk seseorang dan untuk tujuan-tujuan tertentu, berarti bahwa konsekuensinya adalah bahwa Teori Kritis menolak ide bahwa pengetahuan adalah netral atau non politik.

Hal senada diungkapkan oleh Kimberly Hutching (1999:69) bahwa Teori HI tidak hanya tentang politik tetapi Teori HI adalah politik itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa ketika teori tradisional cenderung memandang kekuasaan dan kepentingan sebagai faktor "*a posteriori*" yang mempengaruhi hasil interaksi aktor politik dalam lingkup HI, Teori Kritis justru menekankan bahwa kekuasaan dan kepentingan merupakan faktor "*a priori*" yang mempengaruhi pembentukan pengetahuan.

Penawaran metode berfikir Teori Kritis adalah pernyataan bahwa pembentukan pengetahuan tidak netral karena ada unsur kekuasaan dan kepentingan yang berangkat dari proses kognitif yang secara kontekstual



disituasikan dan menjadi subyek kepentingan politik sehingga harus dievaluasi secara kritis.

Teori HI dalam tradisi berpikir Teori Kritis dikondisikan oleh pengaruh-pengaruh sosial, budaya dan ideologi dan salah satu tugas Teori Kritis adalah mengungkap efek dari kondisi-kondisi tersebut terhadap pembentukan teori yang dilakukan. Inilah yang dijelaskan oleh Richard Ashley (1981: 207) bahwa pengetahuan selalu terbentuk dalam refleksi kepentingan, sehingga Teori Kritis harus membawa kesadaran kepentingan-kepentingan laten, komitmen-komitmen atau nilai yang memunculkan dan memberi orientasi pada setiap teori. Kita harus memahami bahwa studi HI adalah dan selalu tidak terhindarkan memiliki sifat normatif (Neufield, 1995: 108). Karena Teori Kritis melihat hubungan yang erat antara kehidupan sosial dengan proses kognitif, Teori Kritis menolak perbedaan yang dibuat oleh kelompok positivis antara fakta dan nilai, obyek dan subyek.

Akhirnya, penawaran metode berpikir dan penelitian Teori Kritis ini menunjukkan sifat yang emansipatoris. Memungkinkan semua variabel untuk diungkap dan dibicarakan dengan sudut pandang apapun sepanjang logis. Dari sinilah terlihat jelas bahwa, subyektifitas dan pengaruh-pengaruh politik dalam pembuatan dan pengembangan pengetahuan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan atau yang harus dihindari tetapi justru diperlukan untuk mengungkap untuk apa dan siapa pengetahuan atau teori tersebut dibuat.

Penerapan Teori Kritis dalam pengembangan studi HI baik secara umum di dunia maupun di Indonesia tidaklah berbeda. Keberadaan Teori Kritis pada dasarnya membongkar dominasi-dominasi konsep negara dan politik kekuasaan dalam HI. Bagi Teori Kritis, HI tidak terbatas pada suatu pengujian negara dan sistem negara tetapi memfokuskan lebih luas pada kekuatan dan dominasi di dunia secara umum. Teoritis Kritis mencari pengetahuan bagi tujuan politis.

Pada prakteknya, Teori Kritis baik disadari atau tidak telah menyuarakan agenda-agenda (isu-isu) yang selama ini terpendam atau tidak diperhatikan oleh pendekatan-pendekatan tradisional atau klasik dengan metode berpikir yang positivis. Ketika pemikiran-pemikiran kritis yang ditawarkan teori ini muncul, ada banyak hal yang kemudian muncul dalam perdebatan dalam HI. Meskipun ide tentang negara dan sistem negara tidak ditinggalkan, isu-isu atau agenda-agenda yang didiskusikan dalam HI lebih meluas melebihi masalah tersebut. Isu-isu seperti perempuan, kesehatan, kemiskinan, lingkungan, HAM, demokrasi dan lain-lain muncul menyertai perkembangan studi HI.

Konflik tidak lagi dilihat dari masalah perang terbuka antar negara dengan aktor negara dan kekuatan militernya. Dimensi konflik meluas ke arah yang lebih luas seperti konflik etnis, agama dan sosial yang terjadi dalam suatu negara atau ketegangan batas wilayah antar negara. Selain itu, konflik tidak lagi dilihat dari sudut pandang negara saja tetapi meluas kepada masalah kemanusiaan seperti para korban seperti para perempuan dan anak-anak yang akhirnya menjadi pengungsi ke wilayah-wilayah lain untuk mencari rasa aman. Keamanan pun tidak hanya sebatas masalah bagaimana negara mempertahankan wilayah kedaulatannya dari ancaman militer negara lain tetapi lebih pada masalah bagaimana negara bisa memberi rasa aman secara sosial, ekonomi dan budaya kepada warga negaranya dengan menggunakan kedaulatan yang dimilikinya. Tanggung jawab negara menjadi penting untuk memanusiaikan warga negaranya, mensejahterakan dan memakmurkan warganya, serta melindungi hak-hak warganya.

Dalam banyak kasus yang terjadi dalam HI, ada banyak isu yang mungkin dimunculkan sehingga tidak ada dominasi konsep tertentu. Satu masalah bisa dilihat dari banyak dimensi yang menyertainya dengan penjelasan-penjelasan argumentatif yang logis. Konsekuensi seperti inilah

yang memang diharapkan dari penggunaan Teori Kritis dalam memahami masalah-masalah yang terjadi dalam HI. Bahkan masalah-masalah yang sifatnya lokalpun bisa diangkat menjadi suatu diskusi yang berdimensi HI. Segala hal yang bersifat sosial menjadi sangat dimungkinkan untuk dipahami dalam perspektif Teori Kritis dan bisa diangkat dalam lingkup internasional.

Meskipun perluasan ide dan isu yang muncul dalam studi HI menjadi sumbangan penting dari kemunculan pendekatan-pendekatan alternatif, salah satunya adalah Teori Kritis, masih banyak yang belum menyadari bahwa perkembangan ini merupakan kontribusi pendekatan-pendekatan alternatif ini. Banyak yang beranggapan ini adalah fenomena yang memang sudah waktunya untuk dibicarakan atau sudah menjadi sesuatu yang lumrah untuk dibicarakan atau *common sense*. Akhirnya sumbangan berharga ini tertutupi oleh anggapan-anggapan tersebut.

### **Pengaruhnya terhadap Perkembangan Studi HI di Indonesia**

Dilihat dari posisi dan kontribusinya dalam perkembangan studi HI di Indonesia, Teori Kritis jelas memiliki pengaruh yang besar. Memberikan kemungkinan banyaknya agenda-agenda yang dibicarakan dan dilaksanakan dalam lingkup HI merupakan bukti pengaruh keberadaan teori ini di Indonesia. Meskipun terdapat pro dan kontra tentang besaran kontribusi teori ini dalam HI, yang jelas sudah banyak masalah-masalah kontemporer dalam HI dibicarakan sebagai subjek HI sejak tahun 2000an.

Jika dilihat dari kurikulum di beberapa perguruan tinggi di Indonesia (di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, dan Universitas Mulawarman Samarinda), perkembangan yang terjadi memperlihatkan bahwa ada kebutuhan-kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan studi HI global dan kebutuhan pasar yang juga berkembang sesuai dengan tuntutan jaman.

Pendekatan-pendekatan dalam praktek hubungan diplomatik juga mengalami pergeseran aktor. Jika pada masa perang, hubungan antar negara dilihat dari sudut pandang negara, maka pasca Perang Dingin, aktor dalam hubungan antar negara bervariasi sehingga muncul konsep diplomasi multi jalur (*multi track diplomacy*) yang menekankan banyak aktor selain negara, seperti tenaga-tenaga ahli seperti ulama, staf pengajar, ahli medis dan lain-lain.

Kemudian muncul intervensi kemanusiaan dan bantuan kemanusiaan dalam praktek-praktek HI yang menjadi bukti bahwa ada masalah-masalah kemanusiaan yang muncul berbarengan dengan pendekatan negara dalam penyelesaian konflik dan penanggulangan bencana yang terjadi dalam suatu negara. Campur tangan suatu negara yang melintas batas batasan negara menjadi hal yang lajim terjadi dan bisa dipahami hanya dengan memahami penggunaan pendekatan-pendekatan alternatif seperti Teori Kritis. Ini juga menjadi fakta bagaimana teori kritis memiliki pengaruh positif dalam perkembangan studi HI di Indonesia.

Dari sudut pandang ini bisa dilihat bahwa pendapat yang menyatakan bahwa munculnya isu-isu atau agenda-agenda baru dalam HI merupakan hal yang biasa dan tidak berhubungan dengan munculnya pendekatan-pendekatan alternatif termasuk Teori Kritis bisa dipatahkan.

Meskipun kebanyakan penstudi HI memahami dengan baik perkembangan isu-isu baru dan kontemporer dalam HI, masih sedikit atau bahkan tidak menyadari bahwa pendekatan ini datangnya dari pemikiran-pemikiran kritis yang menyuarakan agenda-agenda yang harus disuarakan dalam HI. Namun, sekali lagi, hal ini tidak bisa menjadi pembenaran bahwa Teori Kritis tidak memiliki kontribusi dalam perkembangan studi HI di Indonesia, baik dari sisi teoritis, metodologi maupun praktis. Ketidaktahuan dan ketidakmampuan dalam hal asal usul kemunculan isu-isu baru dalam

HI tidak bisa dijadikan alasan untuk menutupi kontribusi dan pengaruh kemunculan Teori Kritis dalam perkembangan studi HI di Indonesia bahkan dunia.

## **Kesimpulan**

Ada beberapa catatan penting yang perlu dituangkan dalam artikel ini, yaitu: *pertama*, bahwa pada awal perkembangan studi HI di Indonesia diproyeksikan untuk memenuhi kebutuhan negara dalam urusan di luar negeri. Jadi didirikannya Program Studi Hubungan Internasional di beberapa institusi di Indonesia bertujuan untuk mencetak sejumlah tenaga ahli yang berkompeten dalam memperjuangkan diplomasi Republik Indonesia.

*Kedua*, bahwa orientasi teoritis studi Hubungan Internasional di Indonesia pada awal kemunculannya meletakkan negara sebagai aktor utama dalam interaksi politik internasional. Eksistensi negara dalam kancah politik global menjadi subjek kajian studi Hubungan Internasional seperti yang diyakini dalam perspektif-perspektif tradisional seperti realisme dan liberalism. Pada dasarnya studi HI di Indonesia memiliki potensi untuk menciptakan teori HI yang non-Barat karena memiliki elemen pembentuk yang sangat khas seperti: budaya politik Jawa, budaya politik Seberang, pengaruh Islam. Namun sayangnya sumber-sumber tersebut belum mampu dimanfaatkan oleh para ahli HI di Indonesia dengan maksimal. Sehingga teori-teori yang berkembang di Indonesia masih didominasi oleh perspektif yang bercorak *state-centric*.

*Ketiga*, bahwa keberadaan teori kritis dalam studi Hubungan Internasional di Indonesia dapat diamati melalui dua pandangan yang berbeda satu dengan yang lain. Pendapat pertama menyimpulkan bahwa posisi teori kritis masih sangat inferior jika dibandingkan dengan keberadaan perspektif tradisional. Sejak mulai dikembangkan dalam studi Hubungan

Internasional posisi teori kritis memang masih marginal, teori kritis muncul sebagai perspektif alternatif yang penggunaannya sebagai instrument analisis masih sangat jarang digunakan oleh para akademisi maupun praktisi seperti yang terlihat dalam beberapa tulisan yang dipublikasikan melalui media jurnal ilmiah. Pendapat kedua menegaskan bahwa sebagai instrument analisis teori kritis mampu mengimbangi keberadaan teori-teori klasik dengan cara mengkritisi kegagalan teori-teori tradisional dalam menjelaskan fenomena HI pasca perang dingin dan yang paling penting teori kritis membuka peluang bagi pemikiran baru dan isu-isu HI yang lebih beragam.

*Keempat*, sebagai sebuah perspektif teori kritis tentunya memiliki beberapa keunggulan yang berguna bagi pengembangan studi Hubungan Internasional. Secara umum kontribusi teori kritis dapat dilihat dari 3 sudut pandang, yaitu: sudut pandang perspektif, sudut pandang metodologi, dan sudut pandang praktis. Pada tataran teoritik, teori kritis sebagai lokomotif paradigma positifis dalam studi HI membuka peluang bagi analisis dari berbagai dimensi yang tidak *state centric*. Sementara dari sudut pandang epistemologis dan metodologis menunjukkan bahwa metode berpikir teori kritis mempunyai sifat emansipatoris dan menegaskan bahwa proses pembentukan pengetahuan tidak pernah netral karena sangat bias kepentingan dan kekuasaan. Dalam tataran praktis, kontribusi teori kritis dalam studi HI adalah kemampuannya membongkar dominasi teori klasik dalam menganalisis fenomena HI dan secara praktis teori kritis juga mampu menyuarakan agenda yang selama ini tidak diperhatikan oleh pendekatan tradisional.

Adapun pengaruh penting dari keberadaan teori kritis terhadap studi HI di Indonesia adalah memberikan kemungkinan munculnya berbagai agenda yang dibicarakan dan dilaksanakan dalam lingkup HI di Indonesia. Teori kritis juga mampu menjadi pandangan alternatif dalam memahami fenomena HI oleh para penstudi HI di Indonesia.

## Daftar Pustaka

- Asrudin, et.al. 2009. *Refleksi Teori Hubungan Internasional. Dari Tradisi ke Kontemporer*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Baylis, John, and Steve Smith. 2005. *The Globalization of World Politics. An Introduction to International Relations*. 3<sup>rd</sup> edition. Oxford: Oxford University Press.
- Burchill, Scott, and Andrew Linklater. 1996. *Theories of International Relations*. New York: Saint Martin's Press Inc.
- Burchill, Scott, et al. 2005. *Theories of International Relations*. 3<sup>rd</sup> Edition. New York: Palgrave Macmillan.
- Edkins, Jenny, and Nick Vaughan-Williams. 2009. *Critical Theorist and International Relations*. New York: Routledge.
- Folker, Jennifer Steling. 2006. *Making Sense of International Relations Theory*. London: Lynne Rienner Publisher, Inc.
- Jackson, Robert, dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Little, Richard, and Michael Smith. 2006. *Perspectives on World Politics*. 3<sup>rd</sup> edition. London and New York: Routledge.
- Miles, B. Mathew & AM. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press.
- Mansbach, Richard W., and Kirsten L. Rafferty. 2008. *Introduction to Global Politics*. London and New York: Routledge.
- Rosenau, James N., and Mary Durfee. 2000. *Thinking Theory Thouroughly. Coherent Approach to an Incoherent World*. Colorado: Westview Press.
- Steans, Jill, dan Lloyd Pettiford. 2009. *Hubungan Internasional: Perspektif dan Tema*. Terjemahan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Viotti, Paul R., and Mark V. Kauppi. 2006. *International Relations and World Politics. Security, Economy and Identity*. New Jersey: Prentice Hall.

Wolfer, Loreen, 2007. *Real Research: Conducting and Evaluating Research in the Social Sciences*, Boston: Pearson Education Inc.





